

**PENGARUH PAD, DAK, DAN DANA BAGI HASIL (DBH)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2011 – 2014**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh**

**AJI PONCO WIBOWO**

**NIM. B. 200 110 270**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PAD, DAK, DAN DANA BAGI HASIL (DBH)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
TAHUN 2011 – 2014**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**AJI PONCO WIBOWO**  
**NIM. B. 200 110 270**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



**(Dr. Erma Setiawati, MM, CA)**

## PENGESAHAN

### PENGARUH PAD, DAK, DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2014

Oleh :

**AJI PONCO WIBOWO**  
**NIM. B. 200 110 270**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada hari 28 November 2017

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Erma Setiawati, MM,CA  
Ketua Dewan Penguji
2. Drs. Suyatmin WA., Msi  
Anggota 1 Dewan Penguji
3. Drs. Eko Sugiyanto, Msi  
Anggota 2 Dewan Penguji

()

()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

( )  
Drs. Syarifuddin, MM)

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. .

Surakarta 17 Oktober 2017

Penulis

  
  
**AJI PONCO WIBOWO**  
**B2001102170**

# **PENGARUH PAD, DAK, DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2014**

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014.

Sampel dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan teknik pengambilan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Berdasarkan hasil penelitian ini variabel PAD diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $19,982 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $sig < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel DAK diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,798 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $sig < 0,05$ ) maka  $H_2$  diterima artinya DAK mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel DBH diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,590 < t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,114) lebih besar daripada tingkat signifikan 5% ( $sig > 0,05$ ) maka  $H_3$  ditolak artinya DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : PAD, DAK, DBH dan Pertumbuhan Ekonomi

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect Local Revenue on economic growth in the Regency/City in the Province of Central Java Year 2011-2014. To know the effect Special Allocation Fund on economic growth in Regency / City in Central Java Province Year 2011-2014. To know the effect economic growth in Regency / City in Central Java Province Year 2011-2014.*

*The sample in this research is 35 districts / cities in Central Java and sampling technique saturated sampling technique is sampling when all members of the population used as a sample.*

*Based on the results of this study, the Effect Local Revenue variable is known as the  $t_{count}$  of  $19.982 > t_{table} 2,000$  and the significance value (0,000) is smaller than the significant level of 5% ( $sig < 0.05$ ),  $H_1$  is accepted and  $H_0$  is rejected, it means Effect Local Revenue has partial and significant effect on growth Economy. The Effect Special Allocation variable is known as  $t_{count}$  of  $3.798 > t_{table} 2,000$  and the significance value (0.000) is smaller than the*

*significant level of 5% (sig <0,05) so H2 is accepted and Ho is rejected means Effect Special Allocation has partially and significant influence to economic growth. The Effect Economic Growth variable known as tcount of 1,590 <tabel 2,000 and significance value (0,114) bigger than 5% significant level (sig> 0,05) hence H3 rejected and Ho accepted mean the Effect Economic Growth has no partial and significant influence to economic growth.*

*Keywords: Local Revenue Economic Growth, Effect Special Allocation Fund, Effect Economic Growth and Economic Growth*

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selainjuga merangsang perkembangankegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013).

Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini idasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan

keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Kuncoro (2004) dalam Santoso (2013) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintaan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dengan ditunjukkan oleh perubahan output. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Azzahra, 2015).

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014? 2) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014? 3) Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014?

Tujuan penelitian ini 1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. 3) Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014

## **2. METODE**

### **2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2014.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:



## 2.2 Definisi Operasional Variabel

### 2.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel penjelas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel utama atau variabel dependen. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari PAD, DAK dan DBH.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Diukur dengan:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{HRD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Diukur dengan total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus.
- 3) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah bersangkutan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Diukur dengan : Dana Bagi Hasil

### 2.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel utama yang mempengaruhi variabel penjelas atau variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi pula kesejahteraan masyarakat. Indikator variabel ini diukur dengan:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}) / (\text{PDRBt-1}) \times 100\%$$

Dimana:

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun ini

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun kemarin

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 PAD berpengaruh terhadap anggaran pertumbuhan ekonomi.**

Variabel PAD diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $19,982 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan pertumbuhannya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Budi Santoso (2013), Jaya dan Dwirandra (2014), Hartatik (2014 dan Annora Azzahra (2015)

#### **3.2 DAK berpengaruh terhadap anggaran pertumbuhan ekonomi**

Variabel DAK diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,798 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $\text{sig} <$

0,05) maka  $H_2$  diterima artinya DAK mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nurul Widyasari (2013), Jaya dan Dwirandra (2014), Hartatik (2014 dan Annora Azzahra (2015)

### **3.3 Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap anggaran pertumbuhan ekonomi.**

Variabel DBH diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,590 < t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,114) lebih besar daripada tingkat signifikan 5% ( $sig > 0,05$ ) maka  $H_3$  ditolak artinya DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nurul Widyasari (2013), dan Annora Azzahra (2015).

## **4. PENUTUP**

### **4.1.KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PAD diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $19,982 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $sig < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima artinya PAD mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel DAK diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,798 > t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada tingkat signifikan 5% ( $sig < 0,05$ )

maka  $H_2$  diterima artinya DAK mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Variabel DBH diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,590 < t_{tabel} 2,000$  dan nilai signifikansi (0,114) lebih besar daripada tingkat signifikan 5% ( $sig > 0,05$ ) maka  $H_3$  ditolak artinya DBH tidak mempunyai pengaruh pertumbuhan ekonomi.

#### **4.2.Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini pada wilayah yang diteliti yaitu hanya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Penelitian ini terbatas pada variabel yang diteliti yaitu PAD, DAK dan DBH

#### **4.3.Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya mengingat populasi penelitian yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota ada baiknya mengambil lingkup penelitian yang lebih besar lagi, seperti Kabupaten/Kota di Jawa serta menambah periode pengamatan dengan minimal pengamatan 5 tahun.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih memperhatikan besar kecilnya Dana Bagi Hasil mengingat besarnya DBH sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annora Azzahra, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2012.
- Budi Santoso, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartitik, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011).
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Jaya dan Dwirandra, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Nurul Widyasari, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Swastika, Lingga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005 – 2012.